

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konflik Politik

Pada dasarnya politik selalu mengandung konflik dan persaingan kepentingan. Suatu konflik biasanya berawal dari kontroversi-kontroversi yang muncul dalam berbagai peristiwa politik, dimana kontroversi tersebut diawali dengan hal-hal yang abstrak dan umum, kemudian bergerak dan berproses menjadi suatu konflik (Hidayat, 2002:124).

Konflik politik merupakan salah satu bentuk konflik sosial, dimana keduanya memiliki ciri-ciri mirip, hanya yang membedakan konflik sosial dan politik adalah kata politik yang membawa konotasi tertentu bagi istilah konflik politik, yakni mempunyai keterkaitan dengan negara/ pemerintah, para pejabat politik/pemerintahan, dan kebijakan (Rauf, 2001:19).

Konflik politik merupakan kegiatan kolektif warga masyarakat yang diarahkan untuk menentang keputusan politik, kebijakan publik dan pelaksanaannya, juga perilaku penguasa beserta segenap aturan, struktur, dan prosedur yang mengatur hubungan-hubungan diantara partisipan politik (Surbakti, 1992:151).

Sebagai aktivitas politik, konflik merupakan suatu jenis interaksi (*interaction*) yang ditandai dengan bentrokan atau tubrukan diantara kepentingan, gagasan, kebijaksanaan, program, dan pribadi atau persoalan dasar lainnya yang

satu sama lain saling bertentangan (Plano, dkk, 1994:40). Dengan demikian, makna benturan diantara kepentingan tadi, dapat digambarkan seperti perbedaan pendapat, persaingan dan pertentangan antara individu dan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan individu atau individu, kelompok dengan pemerintah (Surbakti, 1992:149).

Salah satu faktor yang menggerakkan potensi konflik menjadi terbuka “ ” (*manifest conflict*), menurut Eric Hoffer adalah faktor keinginan akan perubahan dan keinginan mendapat pengganti Faktor tersebut, suatu saat, mampu menggerakkan sebuah gerakan massa yang bergerak seketika, menuntut perubahan revolusioner (Hoffer:1998).

2.2 Teori-Teori Penyebab Konflik

Konflik sebagai akibat dari menjamnya perbedaan dan kerasnya benturan kepentingan yang saling berhadapan, disebabkan oleh beberapa latar belakang yang ada. *Pertama*, adanya latar belakang sosial politik, ekonomi dan sosial budaya yang berbeda dan memiliki pengaruh yang sangat kuat. *Kedua*, adanya pemikiran yang menimbulkan ketidak sepahaman antara yang satu dengan yang lain. *Ketiga*, adanya sikap tidak simpatik terhadap suatu pihak, sistem dan mekanisme yang ada dalam organisasi. *Keempat*, adanya rasa tidak puas terhadap lingkungan organisasi, sikap frustrasi, rasa tidak senang, dan lain-lain, sementara tidak dapat berbuat apa-apa dan apabila harus meninggalkan kelompok, berarti harus menanggung resiko yang tidak kecil. *Kelima*, adanya dorongan rasa harga diri yang berlebih-lebihan dan berakibat pada keinginan untuk berusaha sekuat tenaga untuk melakukan rekayasa dan manipulasi (Hidayat, 2002:124).

Simon Fisher (2001:7-8) menjelaskan teori penyebab konflik dalam masyarakat. *Pertama*, teori hubungan masyarakat, bahwa konflik yang terjadi lebih disebabkan polarisasi, ketidakpercayaan (*distrust*) maupun permusuhan antar kelompok yang berada ditengah-tengah masyarakat kita. *Kedua*, teori negosiasi prinsip, bahwa konflik disebabkan oleh posisi-posisi yang tidak selaras serta perbedaan pandangan tentang konflik antara pihak-pihak yang terlibat didalamnya.

Ketiga, teori kebutuhan manusia, bahwa konflik yang muncul ditengah masyarakat disebabkan perebutankebutuhan dasar manusia, seperti kebutuhan fisik, mental dan sosial yang tidak terpenuhi dalam perebutan tersebut. *Keempat*, teori identitas, bahwa konflik lebih disebabkan identitas yang terancam atau berakar dari hilangnya sesuatu serta penderitaan masa lalu yang tidak terselesaikan. *Kelima*, teori transformasi konflik, bahwa konflik disebabkan oleh hadirnya masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan dalam ranah kehidupan sosial, ekonomi, politik dan kebudayaan.

2.3 Persepsi Tentang Konflik

Secara sosiologis, konflik dipercaya memiliki dua fungsi, yakni fungsional dan tidak fungsional. Dalam pandangan struktural fungsional, konflik justru akan dapat menciptakan kreasi dan kemajuan masyarakat bahkan mampu mendewasakannya (Hale:2003), akan mampu mengintegrasikan masyarakat serta sebagai sumber perubahan (Surbakti, 1992:150).

Terdapat berbagai tipologi persepsi anggota masyarakat tentang konflik (Yuliyanto, 2004:3). *Pertama*, konflik sebagai sesuatu yang ditabukan. *Kedua*,

konflik sebagai sesuatu yang menakutkan. *Ketiga*, konflik sebagai sesuatu yang harus dihindari. *Keempat*, konflik sebagai sesuatu yang harus dicegah.

Berkaitan dengan konflik ini ada dua pandangan yang berbeda dalam memahami konflik yang terjadi, yaitu pandangan lama dan baru, seperti yang dijelaskan oleh Stephen P. Robbin dalam bukunya *Managing Organizational Conflict*, New York, Prentice-Hall Englewood Cliffts: 1974 (Urbaningrum, 1998:17).

Pandangan Lama	Pandangan Baru
<ul style="list-style-type: none"> - Konflik tidak dapat dihindarkan - Konflik disebabkan oleh kesalahan-kesalahan manajemen dalam perencanaan dan pengelolaan organisasi atau oleh pengacau - Konflik mengganggu organisasi dan menghalangi pelaksanaannya secara optimal - Tugas manajemen (pemimpin) 	<ul style="list-style-type: none"> - Konflik dapat dihindarkan - Konflik timbul karena banyak sebab, perbedaan tujuan yang tak dapat dihindarkan, perbedaan persepsi nilai-nilai pribadi, dan sebagainya - Konflik dapat membantu atau menghambat pelaksanaan kegiatan organisasi (masyarakat) dalam berbagai derajat

Sumber : Stephen P. Robbins (1974) *Managing Organizational Conflict*, dalam Anas Urbaningrum (1998), *Ranjau-Ranjau Reformasi: Potret Konflik Politik Pasca Kejatuhan Soeharto*.

Berdasarkan uraian di atas disimpulkan bahwa untuk menentukan suatu konflik itu bersifat positif atau negatif bergantung pada persepsi kelompok yang terlibat dalam konflik, terutama pada sikap masyarakat secara umum terhadap sistem politik yang berlaku. Dalam hal ini yang menjadi sandaran untuk menentukan suatu konflik bersifat positif atau negatif, yakni tingkat legitimasi

sistem politik yang ada. Hal ini dapat dilihat dari dukungan masyarakat terhadap sistem politik itu sendiri.

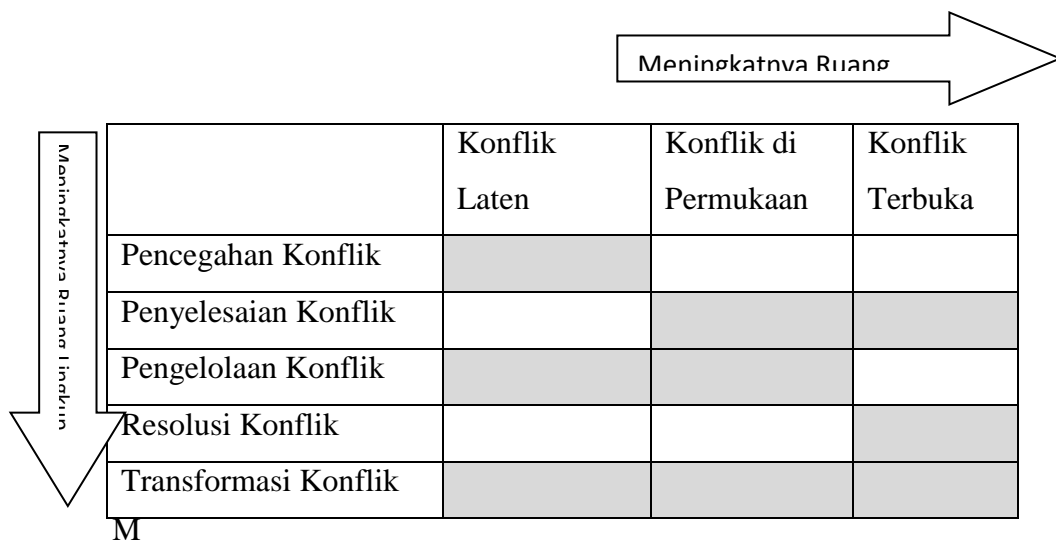
2.4 Pengelolaan Konflik Politik

Dalam konteks demokrasi ada perubahan pemahaman mengenai konflik politik, dimana konflik tidak lagi dipahami sebagai aktifitas yang negatif, buruk, dan merusak, tetapi sebaliknya konflik merupakan aktifitas yang positif dan dinamis. Hal ini berlanjut pada perubahan konsepsi *penyelesaian konflik* menjadi *pengelolaan konflik (management conflict)*. Ini sebuah perbedaan sangat penting. Pertama, *penyelesaian konflik* menunjuk pada penghentian atau penghilangan suatu konflik, dengan demikian implikasinya adalah konflik merupakan sesuatu yang negatif, yang bisa diselesaikan, diakhiri, bahkan dihapuskan. Kedua, berbeda dengan penyelesaian konflik, *pengelolaan konflik* lebih memberi pemahaman bahwa konflik bisa positif, bisa juga negatif. Meskipun makna istilah-istilah tadi tentu masih menjadi perdebatan (*debatable*) hal ini menunjukkan bahwa persoalan konflik memiliki berbagai pendekatan termasuk istilah-istilahnya.

Ada beberapa pendekatan untuk menangani konflik, yang terkadang juga dipandang sebagai tahap-tahap dalam suatu proses. Fisher, dkk (2001:6-7) menggambarkan sebagai berikut. *Pertama*, istilah **pencegahan konflik** yang bertujuan untuk mencegah timbulnya konflik yang keras. *Kedua*, **penyelesaian konflik** bertujuan untuk mengakhiri perilaku kekerasan melalui suatu persetujuan perdamaian. *Ketiga*, **pengelolaan konflik** bertujuan untuk membatasi dan menghindari kekerasan dengan mendorong perubahan perilaku positif bagi pihak-pihak yang terlibat. *Keempat*, **resolusi konflik** yaitu kegiatan menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru yang bisa tahan lama di

antara kelompok-kelompok yang bermusuhan. *Kelima*, **transformasi konflik** yaitu kegiatan mengatasi sumber-sumber konflik sosial dan politik yang lebih luas dan berusaha mengubah kekuatan negatif dari peperangan menjadi kekuatan sosial dan politik yang positif. Berikut gambar yang merupakan penjelasan kelima beberapa istilah tersebut diatas:

Gambar. 1. Respon Terhadap Berbagai Konflik: Melalui Liku-liku Istilah



Mengelola konflik yaitu bagaimana menanganinya dengan cara yang konstruktif, bagaimana membawa pihak-pihak yang bertikai bersama dalam suatu proses yang kooperatif, bagaimana merancang sistem kooperatif yang praktis dan dapat dicapai untuk mengelola perbedaan secara konstruktif, bukan sebaliknya mengadvokasi metode-metode untuk menghilangkan konflik (Harris dan Reilly, 2000:20).

Sedangkan menurut Robinson dan Clifford (Liliweri, 2005 : 288) manajemen konflik merupakan tindakan yang konstruktif yang direncanakan , diorganisasikan, digerakan, dan dievaluasi secara teratur atas semua usaha demi

mengakhiri konflik. Manajemen konflik harus dilakukan sejak pertama kali konflik mulai tumbuh. Karena itu sangat dibutuhkan kemampuan manajemen konflik, antara lain, melacak pelbagai faktor positif pencegah konflik daripada melacak faktor negatif yang mengancam konflik.

Manajemen konflik merupakan sebuah sistem tawar-menawar dan bernegosiasi, dimana dalam konteks demokrasi dapat membantu mengatasi konflik antar kelompok dan menggiring mereka ke dalam dialog dan debat politik, dan menjauhkan mereka dari kekerasan di jalan. Tujuan manajemen konflik adalah menjaga supaya perselisihan yang ada bisa disalurkan ke dalam arena negosiasi dan mencegahnya jangan sampai mengalami peningkatan yang berujung pada konfrontasi dan kekerasan (Sisk dkk, 2002:96).

Ada beberapa hal yang tercakup dalam konsep manajemen konflik menurut Boulding (Liliweri, 2005:289) seperti: (1) adanya pengakuan bahwa dalam setiap masyarakat selalu ada konflik; (2) Analisis situasi yang menyertai konflik, misalnya mengetahui apa sebenarnya yang terjadi, apakah konflik berhubungan dengan nilai, tujuan, cara, teritori, atau kombinasi dari faktor-faktor tadi; (3) Analisis perilaku semua pihak yang terlibat; (4) Tentukan pendekatan konflik yang dapat dijadikan model penyelesaian; (5) Fasilitas komunikasi, yaitu membuka semua jalur komunikasi baik langsung maupun tidak langsung, diskusi dan dialog, dalam rangka *hearing*; (6) Negosiasi yaitu teknik untuk melakukan perundingan dengan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik; (7) Rumuskan beberapa anjuran, tekanan, dan konfirmasi bagi kelestarian relasi selanjutnya; (8) Hiduplah dengan konflik, karena semua konflik tidak dapat dihilangkan kecuali dapat ditekan atau ditunda kekerasannya.

Menurut Fisher (2001:91), tindakan dalam pengelolaan konflik dapat dilakukan dalam tiga cara, yakni: 1) Mengelola konflik secara langsung; 2) Mengelola berbagai akibat konflik; dan 3) Mempengaruhi struktur sosial. Mengelola Konflik Secara Langsung (Fisher,2001:95-108) dapat dilakukan dengan tindakan- tindakan sebagai berikut:

2.4.1 Tahap Persiapan Intervensi

1. Mengidentifikasi, memilih dan mengubah pendekatan terhadap konflik.

Dalam hal ini ada 5 pendekatan yang dapat dicermati, yakni:

- a. Kompromi (Mengurangi harapan-harapan, tawar menawar, memberi dan menerima dan memecah perbedaan).
 - b. Akomodasi (Memberikan persetujuan, menentramkan mengurangi atau mengabaikan perbedaan pendapat, menyerah).
 - c. Pemecahan Masalah (Pengumpulan informasi, dialog, mencari alternatif).
 - d. Pengendalian (Mengendalikan, menyaingi, menekan, memaksa, bertempur).
 - e. Penolakan (Menolak, melarikan diri, menyangkal, mengabaikan, menarik diri, menunda).
2. Mengidentifikasi dan mengurangi prasangka.

2.4.2 Tahap Meningkatkan Kesadaran dan Mobilisasi untuk Mendukung Perubahan

- a. Melobi kepada para pengambil keputusan dan orang-orang yang memiliki hubungan dengan mereka.

- b. Berkampanye, dengan tujuan utamanya adalah menciptakan iklim di kalangan public yang lebih luas, yang akan mendorong atau menekan para pengambil keputusan untuk mengubah kebijakan mereka.
- c. Tindakan langsung dengan tanpa kekerasan melalui: Protes, anti kerjasama, ketidak patuhan sipil, dan berprasa.

2.4.3 Tahap Pencegahan

Mencegah konflik memanas sehingga berubah sekedar menjadi tindak kekerasan, atau bahkan tidak menjadi konflik. Beberapa mekanisme yang dapat di pilih, misalnya:

- a. Membentuk forum yang berasal dari berbagai bagian masyarakat.
- b. Mengirim sesepuh dari marga, suku, atau kelompok tradisional lainnya sebagai utusan.
- c. Mengundang tokoh-tokoh agama untuk melakukan intervensi, dengan tujuan menyediakan ruang untuk dialog.
- d. Memanfaatkan ritual yang ada dengan tujuan untuk membawa orang bersama-sama memperhatikan nilai-nilai yang ada.
- e. Memanfaatkan struktur atau kelompok yang ada dan di hormati.
- f. Menggunakan publikasi secara hati-hati untuk menyoroti kebutuhan tindakan darurat.

2.4.4 Tahap Mempertahankan Kehadiran

Para aktivis lokal dan para pekerja perdamaian dan hak asasi manusia di harapkan dapat mempertahankan kehadirannya, dengan tujuan dapat memberikan

bantuan secara efektif, dan mempengaruhi suasana kembali normal. Tindakan yang dapat dilakukan di sini dapat meliputi: (1) Perlindungan tanpa senjata; (2) Aktif melakukan pemantauan dan observasi terhadap perkembangan situasi.

Pada umumnya rekonstruksi pasca konflik akan terfokus pada upaya-upaya pemenuhan kebutuhan fisik. Sedangkan rekonstruksi psikologis adalah merupakan upaya untuk membantu individu individu atau korban mengatasi masa lampaunya. Misalnya, bantuan untuk mengatasi trauma, dan bantuan kepada korban untuk mengungkapkan pengalaman mereka sehingga terhindar dari tekanan psikologi.

Sementara itu, rekonstruksi atau rekonsiliasi sosial merupakan suatu proses membangun kembali suatu masyarakat yang mengalami kesengsaraan akibat kekerasan/ konflik melalui: *pertama*, Pengungkapan tentang kebenaran penyembuhan dan pemulihan (bukan kebenaran faktual/obyektif ataupun subyektif). *Kedua*, aktualisasi sikap dan perilaku belas kasihan, yakni kemampuan orang-orang yang telah menjadi korban kekerasan/ konflik untuk tetap menghargai sesamanya dan mengakui bahwa mereka bisa hidup bersama. *Ketiga*, penegakan keadilan, yakni tindakan pemulihan hak-hak tanggung jawab, dan kesetaraan yang diberikan kepada para korban kekerasan/ konflik.

Tindakan pengelolaan konflik menurut Fisher (2001:141-153) adalah berupa upaya untuk mempengaruhi struktur sosial. Dalam hal ini ada tiga cara yang dapat ditempuh, yakni: *Pertama*, penyelenggaraan pendidikan, perdamaian dan keadilan, di institusi-institusi formal, informal maupun non formal. Dalam kerangka ini anggota masyarakat diarahkan untuk memiliki pengetahuan, sikap dan ketrampilan damai dan adil kepada sesama manusia. *Kedua*, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. *Ketiga*, membangun pemerintah global. Pemerintah yang baik setidaknya memberikan peluang kepada

proses konsultif, rakyat-pemerintah dan masyarakat madani untuk semakin mandiri.

Dalam kerangka konflik politik akhir-akhir ini, istilah pengelolaan konflik atau manajemen konflik lebih marak dengan istilah resolusi konflik. Menurut Morton Deutch dalam bukunya, *The Resolution of Conflict* (Liliweri, 2005:289) adalah sekumpulan teori penyelidikan yang bersifat eksperimental dalam memahami sifat-sifat politik, meneliti strategi terjadinya konflik, kemudian membuat resolusi terhadap konflik.

Dengan demikian penyelesaian konflik atau resolusi konflik sesungguhnya adalah proses mendiskusikan sebuah atau serangkaian isu, mencapai kesepakatan, dan melaksanakannya, kemudian menghilangkan akar penyebab konflik sebisa mungkin. Sejauh perangkat peraturan itu dipandang adil oleh segenap lapisan masyarakat dan tidak ada kelompok mayoritas yang menentang atau berniat mengganti peraturan itu, konflik yang ada bisa dikatakan berhasil diselesaikan (Siska dkk, 2002:96).

2.5 Model Pengelolaan Konflik Pilkada

Pilkada sebagai bentuk mewujudkan demokrasi di tingkat lokal, kerap kali berujung pada konflik. Konflik itu sendiri biasanya diawali dari pelanggaran-pelanggaran yang selanjutnya menjadi sengketa diantara kelompok yang mencalonkan pasangan kepala daerah, penyelenggara pilkada, dan elemen lain yang terkait dengan penyelenggaraan pilkada. Siapa pun yang ikut ambil bagian dalam arena pilkada tidak menginginkan konflik itu terjadi. Kalau pun pada kenyataannya konflik itu tidak terelakan, maka agar tidak menjadi eskalatif, konfrontatif, dan destruktif perlu adanya model resolusi yang tepat.

Analisis model resolusi konflik atas dasar hasil penelitian yang dilakukan di Kabupaten Tuban dan Kabupaten Lombok Barat dengan memperhatikan catatan lapangan (*field records*), tepatnya atas dasar data emik yang dikumpulkan dari subyek-subyek penelitian, serta dengan mengikuti proses analisa data sebagaimana dikemukakan oleh Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2008), maka data tentang resolusi konflik Pilkada tersebut dapat direduksi (*data reduction*) ke dalam tabel di bawah ini:

Hasil Reduksi Data Resolusi Konflik Pilkada

No.	FOKUS	DESKRIPSI
1.	Persepsi tentang Penyebab Konflik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dominasi ekonomi dan politik di kelompok tertentu; 2. Sikap tidak simpatik terhadap petugas dan sistem atau mekanisme administrasi Pilkada; 3. Rasa tidak puas terhadap lingkungan organisasi Pilkada; 4. Ketidakadilan perlakuan terhadap kontestan Pilkada.
2	Kategori Aktor Resolusi Konflik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aktor Politik; 2. Aktor Ekonomi; 3. Aktor Sosial; 4. Aktor Agama
3	Peran Aktor dalam Resolusi Konflik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pencegahan konflik; 2. Penyelesaian konflik (mengakiri); 3. Pengelolaan konflik (membatasi dan menghindari meluasnya kekerasan); 4. Resolusi konflik (membangun hubungan baru); 5. Transformasi konflik (merubah yang negatif menjadi positif)
4	Tujuan Resolusi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguji validitas bukti-bukti material; 2. Menghentikan konflik dan mengembalikan kerukunan antar pihak yang berkonflik
5	Strategi Resolusi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mekanisme legal-formal; 2. <i>Personal Approach</i>
6	Tempat Resolusi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepolisian dan Pengadilan; 2. Arena social
7	Hasil Resolusi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketetapan hukum legal formal; 2. Transformasi

Berdasarkan hasil reduksi data di atas, selanjutnya kategori-kategori utama, atau konsep-konsep pokok yang ditemukan di lapangan yang terkait dengan proses resolusi konflik kemudian dijadikan bahan untuk dilakukannya display data. Tahap ini merupakan fase dimana kategori pokok yang ditemukan kemudian dicoba saling dihubungkan atau dikoneksikan dengan tujuan agar semakin nampak jelas model yang hendak dicari dalam suatu penelitian.

Penelitian ini menemukan model resolusi konflik yang kemudian kita sebut dengan *fluidity resolution models* atau model resolusi yang mencair sebagaimana tergambar dalam tabel di bawah ini. Disebut dengan model resolusi yang mencair karena menurut temuan di lapangan, ternyata model baku yang ditawarkan pemerintah melalui *desk* Pilkada tidak fungsional untuk merespon dinamika konflik yang muncul. Warga lebih memilih jalur *formal resolution*, jika konflik yang terjadi disebabkan oleh persoalan-persoalan yang ada kaitannya dengan pelanggaran ketentuan hukum positif. Namun jika akar konflik Pilkada itu disebabkan oleh persoalan-persoalan sosial, politik, dan ekonomi, maka warga lebih memilih jalur *informal and accidental resolution*. Ketidakbakuan atau keluwesan mekanisme resolusi konflik semacam inilah yang kemudian penelitian ini menyebutnya sebagai model resolusi yang mencair.

Sebagaimana dipaparkan di bagian terdahulu, resolusi informal dan aksidental tersebut merupakan fungsi dari nilai-nilai dan atau norma-norma sosial budaya (termasuk di dalamnya tentu terkait dengan nilai-nilai agama) yang sangat dihormati oleh warga masyarakat, sekaligus juga merespon *social personality* warga masyarakat Indonesia yang sulit menyelesaikan konflik secara *face to face* di forum formal.

FLUIDITY RESOLUTION MODELS

